

WFM

VALUE FOR MONEY

Edisi 03—Oktober

Bertumbuh Bersama Rumah



PROFESI

Wajah Baru Pelayanan
Publik Terpadu
Melalui Daring

8

ISU

25 Proyek Strategis
Nasional Tuntas di
Penghujung 2022

22

FILM INFRASTRUKTUR

Pruitt-Igoe: Noktah
Merah Perumahan
Amerika Serikat

36

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.

PENASIHAT

Sudiro Roi Santoso, S.T., M.T.

PENGARAH

Agus Sulaeman, ST, MM
 Ir. Arvi Argyantoro, MA
 Reni Ahiantini, ST, M.Sc
 Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T, MDM
 R. Haryo Bekti Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

Anggoro Widyastika, SH, MH

REDAKTUR PELAKSANA

Fenty Meilisyia Syafril, S.Sos, M.Si

EDITOR

Putrawan, SH
 Ruby Esti Aprilia, SH, MH
 Muhammad Alif Hudanto

TIM REDAKSI

Shara Vadya, S.lkom
 Stephanes M. Anugerah R, S.Kom
 Sopan Sopian, S.Sn
 Sheila Abigail
 Rukmi Hapsari
 Ervin Supriyanto, ST
 Novi Riandini, S.Kom
 Indah Pratiwi, S.Sos., M.Si
 Nurul Qolbi, SE., M.Sc
 Rika Andriani, SE., MM
 Rifki Maudianda, SE., MBA
 Rizki Akbar Maulana, S.Kom., ME., MPP
 Glenn Edo Prasetyo Roosland, SIA., MM
 Eka Parlita Dewi, SE
 Reina Rivenska Disa, ST
 Sri Rahmi Purnamasari

REPORTER

Komarudin
 Dwi Cristanto
 Mifta Fadya, S.Tr.Kom.

DESAINER

Fahmi Nurhuda, S.Ds.
 Michael Adha
 Wildan Ilham Mahibuddin, S.Sn.
 Yohanes Adi Anggoro, S.Ds.

SEKRETARIAT & SIRKULASI

Yudhistira Adi Nugroho, SH., MH.
 Dony Triastomo, SE, MM

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Jalan Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru,
 Jakarta Selatan, 12110

Telepon/Fax: (021) 7200793

Email: redaksivfm@pu.go.id

DITERBITKAN OLEH

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

CERITA EDITOR

Perkuat Ekosistem Perumahan untuk Program Perumahan Berkelanjutan

Definisi Rumah secara umum berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian jenis rumah dapat dibedakan menjadi rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah negara. Dalam hal ini, jenis Rumah Umum ditargetkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hak masyarakat untuk bertempat tinggal juga dilindungi oleh UUD 45 pasal 28H ayat 1 “Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan perumahan bagi MBR sangat kompleks. Urusan rumah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan regulasinya, tapi juga menjadi urusan berbagai *stakeholder* yang terlibat di dalam ekosistem perumahan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga pengembang lainnya berada pada *supply side*. Sementara itu, pada *demand side* terdapat MBR yang terdiri dari berbagai desil tergantung jenis pekerjaan dan penghasilan. Hanya MBR pada desil bawah yang harus dibantu oleh Pemerintah untuk memiliki rumah layak huni.

Untuk membantu MBR memiliki rumah, Pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Bantuan kemudahan tersebut dapat diakses oleh MBR melalui perbankan nasional (konvensional atau syariah), perbankan lokal/daerah, maupun bank swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah untuk membantu menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan.

Selain lembaga keuangan perbankan yang terlibat dalam ekosistem perumahan, masih ada lembaga keuangan lainnya yang berperan besar dalam membantu mewujudkan rumah bagi MBR yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai *secondary mortgage* (lembaga pembiayaan sekunder perumahan). PT SMF fokus dalam mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dengan memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan. Fokus PT SMF ini bertujuan mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Di sisi lain, pengalihan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah memberikan peluang yang lebih luas kepada BP Tapera untuk dapat mengembangkan skema pembiayaan perumahan, baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal. Terlebih, penyelenggaraan perumahan akan lebih efektif jika Badan Percepatan

Penyelenggaraan Perumahan (BP3) telah berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mempercepat Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang BP3.

Koordinasi antar instansi pemerintah pusat pun tak kalah penting. Contohnya, koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif bagi *developer* perumahan khususnya bagi MBR.

Dengan melihat berbagai peran penting dari setiap *stakeholder*, ekosistem perumahan melalui koordinasi dan kerjasama antar semua *stakeholder* perlu diperkuat. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi atas setiap mandat yang diberikan oleh Pemerintah kepada instansi tertentu perlu diterapkan. Hal tersebut diperlukan demi mewujudkan Program Perumahan yang Berkelanjutan (*Sustainable Housing Program*).

Maka tepatlah apa yang dikatakan Bung Hatta sebagai Bapak Perumahan pada Kongres Perumahan di Bandung tanggal 25 Agustus Tahun 1950 yang mengatakan, “cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan semua pasti bisa.” ▼



KILAS SAMPUL

Bertumbuh Bersama Rumah

R

asanya tepat untuk menyebut rumah sebagai sarana berlindung dan bertumbuh. Rumah tinggal adalah salah satu sarana yang dapat memenuhi kebutuhan akan rasa aman seperti yang diungkapkan Abraham Maslow dalam teori Hierarki Kebutuhan. Tapi tidak hanya rasa aman, rumah juga dapat mendukung pertumbuhan individu. Seseorang dengan akses tempat tinggal dapat beristirahat dengan cukup dan baik sehingga produktivitas meningkat. Ujungnya, taraf kehidupan pun berangsur semakin baik.

Pakar dan tokoh perumahan Indonesia, Tito Murbaintoro dalam sesi wawancara dengan majalah VFM pernah menyebut pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam satu visi yang sama yang disebutnya sebagai 'Visi Mulia'. Ia merujuk pada amanat konstitusi kita mulai dari Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H sampai peraturan per-undang undangan turunannya yang mengamanatkan bahwa setiap keluarga Indonesia berhak menghuni rumah yang layak, terjangkau didalam lingkungan yang sehat. Rumah huni tidak selalu berarti rumah milik.

Konsep hunian bisa berupa kepemilikan, sewa, bahkan menumpang. Semua itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di bidang perumahan dan permukiman.

Sampul pada majalah VFM edisi ini ingin menggambarkan pertumbuhan individu bersama rumah hunian. Berbagai kebijakan dan fasilitas pembiayaan rumah dikeluarkan pemerintah untuk mengiringi langkah pertumbuhan ini. ▼

Update Financial Close Proyek Infrastruktur KPBU 2022

Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak menyurutkan visi pembangunan infrastruktur negeri. Pemerintah terus berinovasi mencari alternatif pendanaan untuk mengisi selisih pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu skema yang diterapkan adalah pembangunan dengan melibatkan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP).

PPP di Indonesia dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk kepentingan umum. Acuanannya adalah spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/ BUMD dengan menggunakan sumber daya Badan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 2/2021, khususnya pada pasal 9 disebutkan tahapan KPBU terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian KPBU.

Pada April 2022, Proyek Penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) di Jalur Utama Trans Jawa telah mencapai tahap *Financial Close* atau perolehan pembiayaan. Sedangkan 3 proyek lainnya baru akan memasuki tahap *Financial Close*. Pertama adalah Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang akan menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah sekaligus mendukung

pengembangan pariwisatanya. Dengan panjang 184 km dan memiliki 10 simpang susun, direncanakan jalan tol ini akan memiliki 2 jalur dengan masing-masing 2 lajur. Nilai bersih proyek ini adalah USD 139,28 juta dengan proyeksi pengoperasiannya adalah pada 2024.

Kedua adalah jalan tol Yogyakarta-Bawean yang akan menghubungkan Semarang-Solo. Pengoperasiannya diharapkan dapat mengurangi lalu lintas yang padat di jalan arteri, mendukung kawasan industri di koridor Ungaran-Bawean, serta pengembangan kawasan pariwisata Joglosemar. Jalan tol ini direncanakan akan memiliki 4 *interchange* dan beroperasi pada tahun 2023.

Proyek ketiga di sektor Jalan dan Jembatan yang akan memasuki tahap *Financial Close* adalah proyek tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo. Proyek ini ditargetkan beroperasi di kuartal pertama tahun 2023.

Di sektor permukiman, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dari PT Karian Water Service sedang dalam tahap pelaksanaan *Financial Close*. SPAM Karian Serpong akan melayani Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta. Ruang lingkup kerjasamanya mencakup:

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebesar sebesar 4.600 liter/detik, termasuk fasilitas pendukung;

b. Pipa transmisi air minum curah dengan panjang total sekitar 25,2 kilometer dan diameter 700-1.400 milimeter;

c. *Reservoir* Utama kapasitas 8500 meter kubik di Villa Mutiara;

d. Pompa transmisi air minum curah kapasitas 4.600 liter/detik;

e. Fasilitas Pengerangan lumpur;

f. *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) lengkap untuk operasi dan pemantauan.

Di sektor Sumber Daya Air, Bendungan Merangin juga masuk dalam tahap *Financial Close* di tahun 2022. Bendungan Merangin memiliki manfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan (*multipurpose dam*) antara lain, sebagai pengendali banjir dengan kapasitas 583,5 meter kubik/detik, sumber air irigasi untuk mengairi area persawahan seluas 12.000 hektar, penyedia air baku untuk sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 2 meter kubik/detik, pembangkit listrik tenaga air (*hydroelectric power plant*) dengan kapasitas 95-107,5 megawatt, pariwisata, serta pengembangan budidaya air tawar untuk peningkatan ekonomi dan gizi bagi masyarakat setempat. ▼

Detail lebih lengkap terkait Simpul KPBU bisa diakses dengan menghubungi:

Email
simplukpбу@pu.go.id

Daftar Isi

PROFESI

- 8** Wajah Baru Pelayanan Publik Terpadu Melalui Daring



CERITA LOKASI

- 18** Win-Win Solution, Rehabilitas Jaringan Irigasi Melalui KPBU



CERITA MEREKA

- 14** Solusi Kepemilikan Rumah Melalui KPR BP2BT



ISU

- 22** 25 Proyek Strategis Nasional Tuntas di Penghujung 2022



GORESAN INFRASTRUKTUR

- 28** PUPR Dukung Indonesia Wujudkan SDGs Nomor 9



OPINI

- 32** Transformasi Digital Guna Mencapai Target Akses Air Minum Aman Nasional



FILM INFRASTRUKTUR

- 36** Pruitt-Igoe: Noktah Merah Perumahan Amerika Serikat



FAKTA INFRASTRUKTUR

- 40** 7 Fakta Delta Works, Salah Satu Keajaiban Dunia Modern

SALING BICARA

- 46** Apa perbedaan KPR Tapera dan KPR FLPP?

PROFESI

Wajah Baru Pelayanan Publik Terpadu Melalui Daring



Pantja Dharma Oetojo
Kepala Biro Komunikasi Publik

Informasi satu pintu diharapkan menjadi salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menjadi badan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif memenuhi hak publik dalam mewujudkan good governance.

Biro Komunikasi Publik (Birkom) merupakan unit kerja eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Kementerian PUPR) dan berperan selaku koordinator kelompok kerja (pokja) peningkatan kualitas pelayanan publik serta memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian PUPR. Salah satu penyelenggaraan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Birkom adalah terkait dengan Pelayanan Publik Terpadu yang merupakan sistem pelayanan publik yang memadukan unit-unit layanan di lingkungan Kementerian PUPR dalam satu kesatuan pengelolaan, dimana pemberian pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat dan dikelola dengan sistem aplikasi SAHABAT PUPR. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian PUPR, berikut adalah hasil wawancara lengkap dengan Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR Telah Menerapkan Pelayanan Publik Terpadu

Kementerian PUPR telah menerapkan Pelayanan Publik Terpadu mulai Tahun 2022 dan memiliki Visi mewujudkan Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima. Pelayanan Publik Terpadu mengedepankan transformasi digital yang diharapkan meminimalkan frekuensi tatap muka dalam prosedur layanan. Layanan akan ditransformasi menjadi satu tempat dengan satu sistem dan juga satu manajemen. Tujuan penyatuan layanan ini untuk mempermudah, mempercepat, serta mengurangi biaya bagi warga yang membutuhkan pelayanan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo menjelaskan bahwa latar belakang dari adanya Pelayanan Publik Terpadu ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sekaligus menindaklanjuti penerapan Undang-undang Cipta Kerja.

"Jadi intinya semua layanan yang ada di PUPR, khususnya yang ada di kantor Pattimura 20 akan mempunyai tempat, sistem, dan manajemen yang sama," ujar Pantja.

Selanjutnya, Pantja mengatakan bahwa "*No wrong Door Policy*", karena kebijakan ini menjadi hal yang mendasar dari transformasi pelayanan yang ada di Kementerian PUPR. Masyarakat pun bebas untuk melakukan pengaduan, permintaan informasi, hingga konsultasi dalam satu tempat, melalui 8 (delapan) loket yang sudah disiapkan.

Saat ini Pelayanan Publik Terpadu masih melayani pengaduan atau pertanyaan secara *offline*. Namun, sudah ada layanan *call center*, *chat* via WhatsApp, dan layanan secara online untuk Pelayanan Publik Terpadu, yang ditindaklanjuti dalam jam kerja yaitu mulai dari pukul 09.00-16.00 WIB. Khusus untuk layanan pengaduan bisa diakses pada bagian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Aplikasi Sahabat PUPR: Pengembangan Aplikasi Lewat Android dan Siap Launching Tahun 2023

Sebagai pengembangan lebih lanjut dari Pelayanan Publik Terpadu yang saat ini hanya dapat diakses melalui website (sahabat.pu.go.id), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang berada di bawah Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, saat ini tengah mengembangkan aplikasi Sahabat PUPR berbasis Android. Ke depan publik dapat mengakses Pelayanan Publik Terpadu melalui *mobile application*. Sebagai informasi tambahan, Aplikasi Sahabat PUPR ini bertagline "Layanan Dalam Genggaman" dan rencananya akan diluncurkan pada Januari 2023. Layanan Publik Terpadu ini terdiri dari Layanan Peta Geospasial dari Pusat Data dan Informasi; Layanan Konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat Fasilitas Informasi Daerah (PFID), Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi dari Bina Konstruksi (DJBK); Perizinan Penatausahaan dan Penggunaan

SDA dari Ditjen Sumber Daya Air (SDA); Perizinan Ruang Milik Jalan Tol dari Ditjen Bina Marga; Layanan Rumah Negara Gol III dan Konsultasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dari Ditjen Cipta Karya; serta Layanan Informasi Publik dan Pengaduan dari Biro Komunikasi Publik.

Transformasi layanan Sahabat PUPR merupakan salah satu wujud Transformasi Digital di Kementerian PUPR. Oleh karena itu, transformasi layanan ini berdampak pada alokasi biaya, sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola yang baik.

"Artinya kita harus memiliki sumber daya manusia yang bertugas khusus untuk melakukan pelayanan, pengaduan, perizinan, dan konsultasi. Selain itu, kita juga sudah menyiapkan ruang terintegrasi beserta tata kelolanya sehingga diharapkan dapat mendukung kecepatan dan kemudahan pelayanan," jelas Pantja.

Lebih jauh lagi, Pelayanan Publik yang ada di Kementerian PUPR, saat ini telah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, kompeten dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Moto "SIGAP" Pelayanan Publik terpadu, yaitu: Santun, Informatif, Gesit, Akuntabel dan Profesional. Dukungan Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Publik Terpadu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Pantja berharap bahwa pelayanan ini dapat melampaui harapan masyarakat dan mendapatkan hasil yang baik.

"Sebagai badan publik, kita harus bisa memberi layanan melebihi daripada harapan masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat ini, kami melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan ke depannya," tutup Pantja.

Adapun target dari Pelayanan Publik Terpadu lingkup Kementerian PUPR adalah tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang tercermin dalam Index Kepuasan Masyarakat, terselenggaranya layanan sesuai dengan standar pelayanan yang diterapkan dan meningkatnya kualitas layanan, baik secara *offline* maupun *online*. ▼





“

Sebagai badan publik, kita harus bisa memberi layanan melebihi daripada harapan masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat ini, kami melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan ke depannya.

”

Pantja Dharma Oetojo
Kepala Biro Komunikasi Publik

CERITA MEREKA

Solusi Kepemilikan Rumah Melalui KPR BP2BT

Memiliki rumah adalah idaman bagi banyak orang. Ketika harga rumah selalu sulit untuk dijangkau, pemerintah memberikan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).



Usai pertimbangan sekitar 5 bulan, Nova Hendri Rahmawan mantap melakukan akad Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan Bank Jateng. Ia mulai mengumpulkan berkas-berkas persyaratan pada akhir Desember 2021 hingga selesai pada bulan Mei 2022. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya photocopy KTP dan KK, Surat Nikah, Surat Keterangan Penghasilan, Rekening Koran Tabungan 3 bulan, serta Sertifikat Tanah dan PBB.

“Kesulitan saya rasa tidak ada, cuma berkas yang harus dipenuhi lumayan banyak dan butuh waktu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses bantuan ini agak sedikit panjang,” ujar Nova yang berwirausaha di Demak, Jawa Tengah. Nova mendapat informasi bantuan BP2BT melalui status Whatsapp temannya. Kemudian ia segera bertanya lebih lanjut melalui pihak Dinas Permukiman Kabupaten Demak.

Kredit perumahan yang diambil oleh Nova berjangka waktu 5 tahun, dengan cicilan per bulan Rp1,4 juta. Saat itu, ia harus mendatangi kantor Bank Jateng untuk pengajuan kredit serta menandatangani berkas.

“Rumah belum ditempati karena sekarang masih dalam proses penambahan teras depan dan dapur belakang,” tuturnya.

BP2BT

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) merupakan program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan telah mempunyai tabungan. Bantuan ini diberikan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Dana BP2BT ini diberikan sebanyak satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah Tapak, atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya, atau Sarusun melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.

Jumlah dana yang diberikan kepada Penerima Manfaat ditentukan dari penghasilan kelompok sasaran dan nilai rumah atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). Nominal terbesar mencapai Rp32,4 juta dan paling sedikit Rp21,4 juta. Lalu besaran uang muka untuk kepemilikan rumah yang diberikan BP2BT paling sedikit 20 persen dan paling banyak 50 persen dari nilai rumah, dimana uang muka yang disediakan oleh kelompok sasaran paling sedikit 5 persen. ▼

“

Kesulitan saya rasa tidak ada, cuma berkas yang harus dipenuhi lumayan banyak dan butuh waktu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses bantuan ini agak sedikit panjang.

”

Nova Hendri
Penerima Manfaat KPR BP2BT

Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran BP2BT yang Terbagi Menjadi 3 (tiga) Zona Wilayah



Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan Paling Banyak (Rp)

Zona 1

Kepemilikan Rumah

Rumah Tapak
6.000.000

Rumah Tapak
7.000.000

Pembangunan Rumah Swadaya
6.000.000

Zona 2

Kepemilikan Rumah

Rumah Tapak
6.000.000

Rumah Tapak
7.500.000

Pembangunan Rumah Swadaya
6.000.000

Zona 3

Kepemilikan Rumah

Rumah Tapak
6.500.000

Rumah Tapak
8.500.000

Pembangunan Rumah Swadaya
6.500.000

Win-Win Solution, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melalui KPBU

CERITA LOKASI

Jaringan irigasi mempunyai potensi yang besar bagi kehidupan maupun perekonomian masyarakat. Kerja sama dengan swasta menjadi upaya lain dalam merawat dan melestarikan keberadaannya.

Foto Oleh
Britannica
↓

Rehabilitasi pada Jaringan Irigasi Komeriing adalah salah satu target pemerintah dalam Rencana Strategis (Renstra) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024. Renstra PUPR menyasar rehabilitasi seluas 2 juta hektar dan pembangunan 500 ribu hektar jaringan irigasi baru. Target tersebut sejalan mendukung ketahanan pangan nasional melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

PT Brantas Abipraya (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. HK 0101-MN/986.4 tanggal 28 April 2022 perihal Surat Izin Prakarsa Proyek KPBU Daerah Irigasi

Komeriing, Provinsi Sumatera Selatan melalui Mekanisme KPBU (*Unsolicited*). Melalui surat keputusan tersebut, perusahaan juga melakukan studi kelayakan operasi dan pemeliharaan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Komeriing dengan sistem KPBU (*Unsolicited*), dalam waktu enam bulan sejak surat diterbitkan.

Bentuk kerjasama pada proyek ini menggunakan skema kontrak RDBFOMT (*Rehabilitation-Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer*). Nantinya PT Brantas Abipraya akan bekerjasama dengan Pemerintah selama 15 tahun, yang terdiri dari rehabilitasi 2 tahun dan operasi 13 tahun.

Daerah Irigasi (DI) Komeriing memiliki lahan potensial seluas 121.500 hektar, sejak 1990 hingga 2015 telah terbangun jaringan irigasi fungsional seluas 59.148 hektar yang terdiri atas Saluran Induk Komeriing, saluran sekunder, sub sekunder dan jaringan tersier.

Modernisasi Irigasi

Sarana irigasi serta pengelolaannya penting dilakukan revitalisasi. Hal ini dilakukan mengingat adanya potensi bencana kekeringan yang mengharuskan dam penampung dan salurannya mulai menggunakan teknologi tinggi.

Revitalisasi ini juga terkait erat dengan kegiatan tanam yang sudah lumayan maju. Namun kemajuan tersebut seringkali terkendala oleh pasokan air yang disebabkan oleh belum memadainya jaringan irigasi.

Ruang lingkup dalam proyek ini meliputi rehabilitasi jaringan irigasi utama sepanjang 46.533 meter, 415 buah pintu air dan perkerasan jalan inspeksi sepanjang 406.763 meter. Penggunaan *Smart Irrigation Asset Management System* pada



Foto Oleh
Britannica



“

Terdapat dua manfaat ekonomi bagi masyarakat ketika proyek ini berlangsung. Pertama manfaat ekonomi selama masa konstruksi atau rehabilitasi, kemudian manfaat kedua selama masa operasi berlangsung.

”

Virtual Konsultasi Publik Proyek KPBU
Unsolicited Daerah Irigasi Komeri,
Sumatera Selatan

Bendung Perjaya dan jaringan irigasi utama serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi utama sepanjang 593.149 meter dengan tambahan Sub DI Lempuing seluas 8.600 hektar pada tahun 2026.

Daerah Irigasi Komeri terdiri dari 1 IP3A, 42 GP3A, 241 P3A dan 9 wilayah pengamat, yaitu Wilayah Pengamat Komeri, 11.838 hektar; Wilayah Pengamat Komeri Selatan (Bahuga) 8.674 hektar; Wilayah Pengamat Belitang I, 5.481 hektar; Wilayah Pengamat Belitang II, 7.350 hektar; Wilayah Pengamat Belitang III, 7.404 hektar; Wilayah Pengamat Macak I, 4.726 hektar; Wilayah Pengamat Macak II, 7.706 hektar; Wilayah Pengamat Muncak Kabau, 6.021 hektar; dan Wilayah Pengamat Lempuing, 3.698 hektar.

Selama masa konstruksi dan rehabilitasi, proyek ini akan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Selain itu, selama operasi berlangsung akan muncul peningkatan layanan air irigasi sesuai dengan rencana yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, potensi penambahan musim tanam, dan penambahan lapangan pekerjaan. ▼

Henry Trisaputra Zuna
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR

ISU

25 Proyek Strategis Nasional Tuntas di Penghujung 2022

Kementerian PUPR mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan mengubah target pembangunan sesuai regulasi yang ada.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menuntaskan pembangunan 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) per Oktober 2022 dari total target 35 PSN yang direncanakan akan selesai pada tahun 2022. Proyek tersebut terdiri atas sektor jalan tol sebanyak 19 proyek, sektor bendungan sebanyak 11 proyek, sektor irigasi sebanyak 3 proyek, sektor air minum sebanyak 1 proyek, dan sektor pendidikan sebanyak 1 proyek.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan proyek KPBU Bidang PUPR Tahun Anggaran 2022 baik *solicited* maupun *unsolicited* saat ini terbagi ke dalam dua tahapan yakni, tahap Penyiapan dan tahap Transaksi.

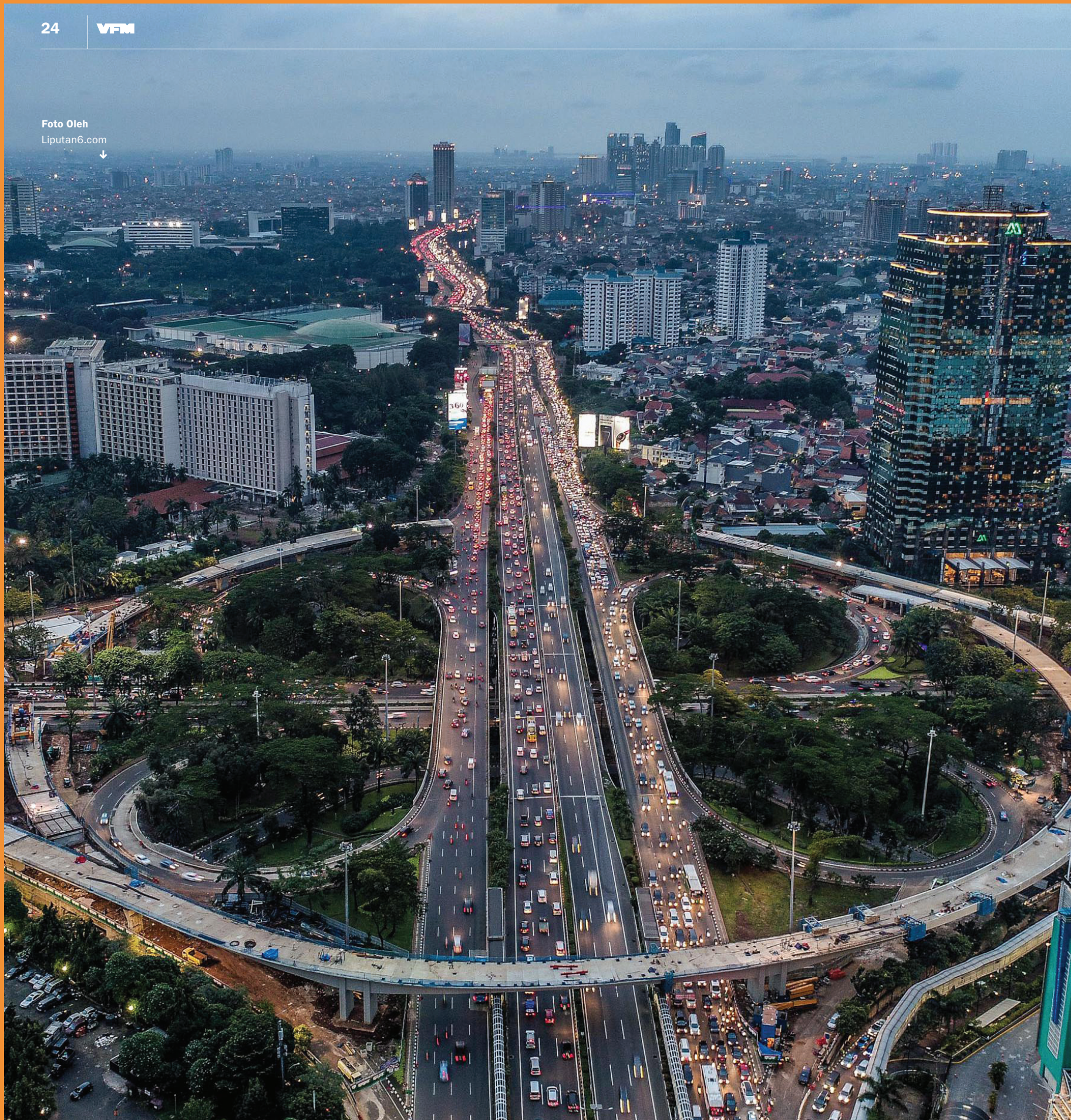
Selain itu, sebanyak 7 proyek KPBU yang ditargetkan dapat mencapai *Financial Close* pada tahun 2022 yaitu terdiri 5 proyek sektor Jalan dan Jembatan dan 2 proyek sektor Air Minum. Dari total 7 proyek KPBU tersebut, ada 2 proyek yang sudah mencapai *Financial Close* yaitu Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I.

"Lalu 5 proyek lainnya dalam proses untuk mencapai *Financial Close* yaitu: Jalan Tol Yogyakarta-Bawean, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Nyia Kulonprogo, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dan SPAM Regional Karian-Serpong," ujarnya kepada majalah VFM.

Herry juga menyatakan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan berdasarkan Perintah Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lalu, ada juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional ditetapkan bahwa daftar PSN yang semula berjumlah 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program.

Dari total 200 proyek PSN dan 12 program yang masuk dalam perubahan proyek PSN, khusus untuk proyek PSN yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR ada sebanyak 124 proyek dan 6 program. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022.

Foto Oleh
Liputan6.com



Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah khususnya Kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur. Dijelaskan Herry, tiga tantangan tersebut berupa Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan *creative financing* guna mengurangi *funding gap* pembangunan infrastruktur.

"Kalau untuk proyek pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan, pembiayaannya dapat bersumber dari *equity* atau perbankan. Untuk *refinancing* dapat dilakukan apabila sudah tidak ada resiko konstruksi dan resiko tanah sehingga harapannya dapat dilakukan *refinancing* dengan pinjaman yang lebih murah," ujar Herry.

Herry juga menekankan setiap Rupiah yang dibelanjakan, harus dapat memberikan manfaat yang maksimal. "Kita harus dapat melakukan *exercise* skema pembiayaan, melakukan *research* di pasar modal atau kita juga dapat melakukan modifikasi skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat diperoleh secara maksimal, misalnya melalui *divestasi* maupun *sekuritisasi*," ungkap Herry.

Modifikasi skema pembiayaan bertujuan mempercepat sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek infrastruktur. Contohnya di sektor jalan tol dan jembatan terdapat skema *Contractor Pre-Financing* (CPF). Skema CPF dapat diterapkan agar kontraktor dapat memulai konstruksi proyek menggunakan modal atau *equity* Badan Usaha Pemenang tanpa harus menunggu kontrak kredit sindikasi atau *Financial Close*. Umumnya, konstruksi baru bisa berjalan setelah *Financial Close*.

Selain skema CPF, sektor jalan dan jembatan juga menerapkan skema estafet *financing*. Skema ini memungkinkan perpindahan dari satu investor ke investor lain dalam satu proyek lewat perantara Indonesia Investment Authority (INA). *Creative financing* lain yang juga diterapkan adalah *asset recycling*. *Asset recycling* dapat membantu pembangunan infrastruktur tanpa harus memperbesar kapasitas *resource*.

Contohnya proyek jalan tol dengan skema pengembalian *availability payment* (AP) yang telah mencapai *price to book value* (PBV) sama dengan 1. Meskipun kondisi tersebut berarti belum banyak keuntungan dari segi investasi, tapi dari sisi Pemerintah sudah bagus karena uangnya kembali 100%. Pada kondisi PBV wajar ini, pemerintah dapat menawarkan hak kelola jalan tol pada badan usaha. Pembayaran hak kelola ini dapat digunakan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur lainnya.

“Selama ini, (Pemerintah) bangun (infrastruktur) dan dikelola hingga akhir masa konsesi. Sedangkan ini setelah jadi infrastrukturnya, kemudian di-sekuritisasi untuk membuat jalan baru,” jelas Herry. *Asset recycling* juga dapat diterapkan di sektor perumahan dengan adanya instrumen bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF). SMF yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan berperan membeli suatu kredit kepemilikan rumah (KPR) dari bank kreditur. Kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek utang bernama Efek Beragun Aset (EBA) yang dijual kepada investor. Dana penerbitan EBA ini sangat besar potensinya untuk ikut membiayai pembangunan rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu yang lebih panjang sehingga memudahkan masyarakat saat mencicil rumah.

“Jadi tentu skema-skema ini mempercepat pembangunan infrastruktur karena kapasitasnya meningkat, sesuai *turn over*-nya,” tegas Herry.

G20 dan Paris Agreement Kaitannya dengan Arah Investasi dan Orientasi Infrastruktur di Indonesia

Pengaruh Forum G20 dan Paris Agreement 2016 sangat besar pada arah investasi dan orientasi infrastruktur di Indonesia. Dalam Infrastructure Working Group (IWG) forum G20 terdapat 6 agenda utama yang dibahas, yaitu Investasi infrastruktur berkelanjutan, Inklusi sosial dan kesenjangan daerah, Infrastruktur transformatif pasca pandemic, Indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII), Infrastruktur digital dan *Infratech*, dan Tata kelola *Global Infrastructure Hub* (GI Hub).

Sesuai dengan Paris Agreement 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen hingga 41 persen pada tahun 2030, dan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. “Kementerian PUPR harus dapat berkontribusi untuk mencapai pengurangan emisi yang 29 persen dapat dicapai melalui berbagai sektor, misalnya sektor perumahan dengan menggunakan asas *green* tapi *affordable* dan bersertifikasi,” ujar Herry.

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement 2016 dan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs tahun 2030 salah satunya terwujud dalam peraturan

Foto Oleh
Wirestock
→

terkait Bangunan Gedung Hijau (BGH): Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Lalu pada sisi pembiayaan, Kementerian PUPR sedang mengembangkan ekosistem pembiayaan untuk seluruh infrastruktur PUPR, dimana yang tengah berproses diantaranya Indonesia *Green and Affordable Housing Program* (IGAHP). “Perlu dipersiapkan perencanaan secara matang agar investor dapat tertarik untuk berinvestasi pada proyek yang sifatnya *green*,” jelasnya. Di sisi lain, persiapan ini membutuhkan ketelitian dikarenakan perbedaan persyaratan pada masing-masing *lender*.

“Misalnya persyaratan dari World Bank, bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pengadaan tanah harus dipastikan tidak akan mengganggu kehidupannya di kemudian hari, artinya Pemerintah harus dapat menjamin bahwa taraf hidup masyarakat yang terdampak akan lebih baik. Pada praktiknya ada hal yang tidak sejalan dengan kita meskipun kita sudah melakukan sosialisasi,” ucapnya.

Pembangunan Infrastruktur Digital dan Berteknologi juga turut menciptakan efisiensi dan efektifitas operasionalisasi dalam penyediaan layanan infrastruktur kepada masyarakat. Kementerian PUPR saat ini telah mengembangkan Sistem Transaksi Tol Non tunai berbasis *Multi Lane Free Flow* (MLFF) dan *Smart and Integrated Water Management Initiative*. ▼



“
Kita harus dapat melakukan *exercise* skema pembiayaan, melakukan *research* di pasar modal atau kita juga dapat melakukan modifikasi skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat diperoleh secara maksimal, misalnya melalui divestasi maupun sekuritisasi.
”

Herry Trisaputra Zuna
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR

GORESAN INFRASTRUKTUR

PUPR Dukung Indonesia Wujudkan SDGs Nomor 9



Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 9, yaitu Infrastruktur, Industri, dan Inovasi. Sebagai salah satu 'tangan' pemerintah, PUPR menargetkan jalan tol tambahan sepanjang 356 km dan 9 bendungan akan rampung pada akhir 2022.

SDGs merupakan sebuah program dari *United Nations Development Programme* (UNDP) yang membantu pembangunan negara-negara berkembang dengan merumuskan 17 tujuan dengan 169 target yang disetujui oleh 193 kepala negara. Diharapkan SDGs dapat terwujud pada tahun 2030 agar tidak ada yang tertinggal (*Leave No One Behind*).

Di Indonesia pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan dan perekonomian terus dilakukan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merinci, hingga Agustus 2022 PUPR telah berhasil

PUPR dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal.

mengoperasikan sepanjang 43 km di 4 ruas jalan. Pertama, tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,4 km. Kedua, tol Binjai-Langsa seksi Binjai-Stabat sepanjang 11,8 km. Ketiga, tol Manado-Bitung seksi Danowudu-Bitung sepanjang 13,4 km. Terakhir, tol Sigli-Banda Aceh seksi Seulimeum-Jantho sepanjang 6,3 km.

"Ini semua yang akan kita selesaikan pada akhir tahun sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau Renstra PUPR. Dalam dokumen ini ditetapkan PUPR harus melakukan pembangunan jalan baru sepanjang 2.500 km," ujarnya.

Sementara itu, ada 9 bendungan yang akan rampung pada tahun 2022 ini: Bendungan Margatiga di Lampung; Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Bendungan Sadawarna di

Jawa Barat; Bendungan Semantok di Jawa Timur; Bendungan Lolak dan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara; Bendungan Tamblang di Bali; dan Bendungan Beringin Sila di Nusa Tenggara Barat.

Selain pembangunan 32 unit bendungan, bidang Sumber Daya Air (SDA) juga membangun 47.119 Ha daerah irigasi, merehabilitasi 153.333 Ha jaringan irigasi, membangun 28 embung, menyediakan 3,48 m³/detik air baku, dan membangun 157 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

✎

Foto Oleh
Evening Tao

Foto Oleh
Evening Tao

Perkembangan Pelaksanaan SDGs

Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur serta inovasi teknologi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peralihan ke teknologi terkini, permasalahan mengenai ekonomi dan lingkungan seperti menyediakan lapangan kerja dan mendorong efisiensi energi dapat dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam penelitian ilmiah serta inovasi.

Salah satu contoh adalah beralih ke teknologi listrik dan pembangkit listrik terbarukan. Sehingga penggunaan kendaraan, operasional sehari-hari dalam rumah tangga, serta manufaktur dapat dilaksanakan tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, lebih dari 4 miliar orang masih belum memiliki akses internet, padahal 90%nya berada di negara-negara berkembang. Mengantarkan orang menyebrang ke akses digital ini menjadi penting agar ada kesetaraan akses pada informasi dan pengetahuan, sehingga dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan.▼

OPINI

Transformasi Digital Guna Mencapai Target Akses Air Minum Aman Nasional

P

proses digitalisasi tidak dapat dihindari karena tak lepas dari anggapan bahwa perangkat digital lebih memudahkan kerja manusia dalam mengumpulkan data dan informasi daripada perangkat manual. Kemudahan tersebut juga diiringi dengan biaya rutin yang relatif menjadi lebih murah. Walaupun, konsekuensi dari digitalisasi adalah angka investasi awal yang cenderung sangat besar.

Di era disrupsi teknologi ini, manusia tidak lagi disibukkan dengan proses pengumpulan data. Peran manusia telah dibantu oleh perangkat digital yang dapat mengumpulkan data dari mana saja dan kapan saja. Sehingga, manusia dapat mengoptimalkan kelebihannya di antara makhluk hidup lainnya, yaitu kecerdasan.

Melalui kecerdasan tersebut, manusia mampu mengolah dan menganalisis data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut dapat menjelaskan suatu fenomena, mendiagnosis suatu permasalahan, mencegah terjadinya suatu kerugian, dan juga dapat memprediksi masa depan.

Besarnya nilai manfaat dari pengumpulan dan analisis data tersebut mendorong banyak orang untuk mengimplementasikan digitalisasi di berbagai bidang. Tidak terkecuali pada sektor infrastruktur permukiman. Digitalisasi memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan di sektor air minum.

Optimalkan Layanan Air Minum Melalui Digitalisasi

Teknologi memang mendisrupsi atau mengubah segala sesuatu dengan cepat. Namun, digitalisasi bukan hanya berarti berupa pemasangan layar raksasa dalam ruang kontrol untuk memonitor sistem penyediaan air seperti di film-film fiksi.

Implementasinya justru harus dimulai dengan penggunaan teknologi yang sederhana dan praktis sehingga menunjukkan nilai nyata dan jelas bagi para konsumen. Dari sanalah, sistem dapat diperluas secara bertahap dengan lebih banyak fungsi. Sehingga nantinya selaras dengan proses kerja yang terus ditingkatkan.

Jangan sampai upaya digitalisasi gagal memberikan nilai tambah dalam pelayanannya dalam jangka pendek. Alih-alih mengarah pada operasi yang lebih efisien, hal ini dapat menghambat pengembangan lebih lanjut.

✎

Foto Oleh

Worchi Zingkhai

Dalam pelayanan air minum, transisi dari konservatif ke digital tidak bakal terjadi dalam semalam. Maka dari itu, layanan digital harus beroperasi bersamaan dengan proyek air tradisional selama beberapa tahun peralihan.

Ada dua jenis proyek air yang harus dilaksanakan dan dipelihara bersama-sama. Yang pertama adalah proyek infrastruktur tradisional, atau proyek 'air terjun', dengan pembelian peralatan, implementasi, pelatihan, dan serah terima dalam proses terjadwal dan terbatas.

Yang kedua adalah proyek 'gesit', di mana antar lembaga pelaksana membutuhkan bantuan dalam transformasi organisasi mereka. Mereka membutuhkan bantuan jangka panjang guna mengembangkan secara berkelanjutan. Mulai dari strategi organisasi, struktur, sampai proses kerja.

Menyambut Era Digital Air Minum di Indonesia

Di Indonesia, upaya untuk menjawab disrupsi teknologi di era digital ini mulai bermunculan. Hal ini terlihat dari banyaknya Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM/ BUMD/Perumda) mengubah layanannya ke dalam bentuk digital.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menerangkan bahwa digitalisasi telah memasuki pelayanan air minum di Indonesia. “Kami mengimplementasikan SCADA untuk otomatisasi pengoperasian SPAM di Kali Dendeng, Bandar Lampung, Labuan Bajo, dan Smart Water Management untuk monitoring kebocoran di Kota Semarang dan Denpasar,” terang Menteri Basuki dalam sambutan di Indonesia Water Forum 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022.

“

Proyek tersebut 11 diantaranya sudah beroperasi, 7 dalam tahap konstruksi, 10 dalam tahap prakonstruksi, 4 dalam tahap lelang dan transaksi, serta 17 dalam tahap penilaian atau persiapan.

”



↑

Foto Oleh
Tham KC

Melalui kegiatan tersebut juga dapat diketahui bahwa digitalisasi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan di wilayah dengan cakupan pelanggan besar. Salah satunya adalah Perumda Air Minum Tirta Keumuneng Langsa yang berasal dari Kota Langsa, Provinsi Aceh, telah mengembangkan aplikasi bernama E-PDAM Langsa. Aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore dan *official website* memungkinkan pelanggan untuk melakukan cek tagihan, pengaduan pelanggan, cek status pengaduan, pendaftaran sambungan baru, dan peta sebaran mitra.

Sedangkan di wilayah pelanggan besar salah satunya adalah PDAM Surya Sembada asal Kota Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini PDAM Surabaya membuat banyak kemajuan dengan membuat *monitoring* dan *forecasting* analisa data dari sistem produksi dan distribusi, yang bisa membantu top manajemen untuk mengambil keputusan lebih cepat, dari sisi penanganan gangguan maupun efisiensi proses, demi peningkatan pelayanan ke pelanggan. ▼

FILM INFRASTRUKTUR

Pruitt-Igoe: Noktah Merah Perumahan Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat berusaha menghidupkan daerah St. Louis dengan hunian modern abad 20. Namun mereka gagal.

Foto Oleh
imdb.com



Perkembangan infrastruktur negara adidaya, Amerika Serikat, tidak selamanya mulus. Negara ini pernah mengecap pelajaran penting dari sebuah kegagalan dalam sejarah infrastruktur perumahannya di tahun 1950-an. Saat itu, sebuah proyek perumahan terbesar bergaya modern minimalis di AS, Pruitt-Igoe, gagal menjadi solusi perumahan kumuh. Serangkaian masalah pemeliharaan yang buruk, tingkat kejahatan tinggi, dan tingkat hunian yang rendah justru menghantui Pruitt-Igoe. Hingga akhirnya, usai berbagai upaya membalikkan keadaan, perumahan ini diruntuhkan tuntas di tahun 1972-1976.

Sineas Chad Freidrichs mencatatkan peristiwa tersebut dalam film dokumenter bertajuk "Pruitt-Igoe Myth". Chad juga membeberkan alasan dibalik kegagalan proyek karya arsitek bernama Minoru Yamasaki tersebut. Nyatanya, kegagalan hunian dalam kompleks Pruitt-Igoe bukan karena komposisi demografis penduduknya. Namun akibat dari kekuatan sosial eksternal yang lebih luas, yaitu penurunan ekonomi St. Louis di negara bagian Missouri.

Persoalan tingkat ekonomi di St. Louis berdampak domino pada pada kesempatan kerja dan kegagalan proyek untuk memenuhi proyeksi hunian sejak awal. Pendapatan penghuninya pun menurun dan target pendapatan bulanan Pruitt-Igoe untuk menutupi biaya pemeliharaan tidak tercapai. Akibatnya, fasilitas umum seperti tempat pembakaran sampah tidak bisa beroperasi, pipa ledeng tidak berfungsi, dan lebih banyak masalah terus berlanjut hingga warga berhenti membayar sewa.

Foto Oleh
imdb.com



Foto Oleh
imdb.com



Foto Oleh
imdb.com



Melalui film ini, Chad menjelaskan atas kegagalan Pruitt-Igoe yang berkembang pun dibongkar, termasuk kesalahan teori arsitektur modernis. Banyak arsitek mengatakan bahwa Pruitt-Igoe merupakan tempat yang ikonik, dan bisa menjadi awal dari gerakan modern. “Makanya kalau ini gagal, maka gerakan arsitek modern juga gagal,” ujar Chad Freidrichs, sutradara The Pruitt-Igoe Myth Documentary.

Film yang dirilis pada 11 Februari 2011 melalui Oxford Film Festival ini menampilkan wawancara mantan penghuni kompleks Pruitt-Igoe, mantan penduduk St. Louis, dan arsip-arsip proyek kompleks Pruitt-Igoe. Dan secara keseluruhan, film ini menggambarkan bahwa arsitektur bisa saja menjadikan kehidupan manusia lebih baik atau lebih buruk. Tetapi faktor-faktor yang benar-benar mengubah kehidupan masyarakat adalah politik, ekonomi, dan hal-hal lainnya, seperti ada atau tidaknya prasangka sesama manusia. ▼

“

Persoalan tingkat ekonomi di St. Louis berdampak domino pada pada kesempatan kerja dan kegagalan proyek untuk memenuhi proyeksi hunian sejak awal.

”

7 Fakta Delta Works, Salah Satu Keajaiban Dunia Modern

Belanda adalah negara yang sepertiga wilayahnya di bawah permukaan laut, dan dua pertiga wilayahnya rentan banjir. Kincir angin Polder abad XV adalah cara awal yang digunakan untuk memompa air dari rawa, dan menciptakan polder atau petak lahan kering. Sayangnya, cara itu tidak cukup sehingga Banjir Laut Utara di tahun 1953. Untuk itu, Belanda membuat proyek Delta Works, rantai besar struktur penahan banjir. Struktur ini menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia modern berdasarkan *American Society of Civil Engineers*. Mari intip beberapa fakta menarik dari penghalang banjir yang mampu mengurangi risiko banjir hingga satu kali dalam 4.000 tahun ini.▼

Foto Oleh
Ermir Hoxhaj
✍



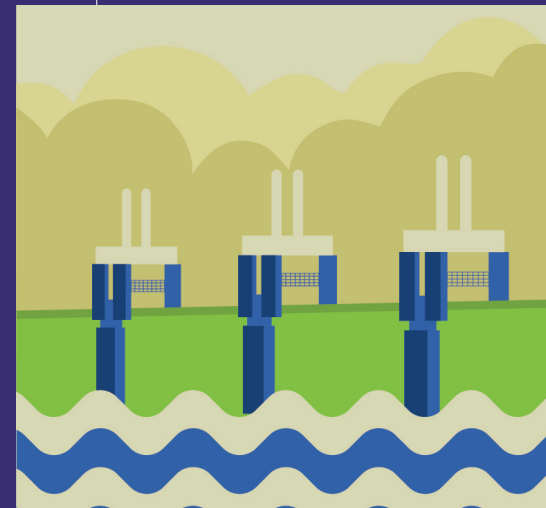
01

Terdiri dari banyak infrastruktur.



02

Meningkatkan kualitas air bersih dan irigasi yang berkualitas.



03

Ada bangunan penghalang badai terbesar di dunia dalamnya.



04

Bantu kembangkan cagar alam.

Foto Oleh
Stephan
↓



SPAM Umbulan

SPAM Regional Umbulan merupakan Proyek KPBU yang akan melayani Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan PDAM (Kawasan Industri).

Foto Oleh
Stephan



SPAM Pekanbaru

Proyek SPAM Kota Pekanbaru, merupakan salah satu hasil Proyek KPBU antara Perumdam Tirta Siak Pekanbaru dengan PT PP Tirta Madani.



Foto Oleh
Dokumentasi DJPI

Tol Pekanbaru-Dumai

Aerial View Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Dumai, tol dengan Panjang 131,48 kilometer diharapkan akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

SALING BICARA

Apakah Peserta KPR Tapera Mendapatkan SBUM?

Pertanyaan

Assalamualaikum selamat sore admin DJPI, perkenalkan saya Siska Konsumen KPR subsidi melalui tapera, mohon maaf, saya ingin mengkonfirmasi apakah peserta tapera tidak mendapat subsidi SBUM dari pemerintah? Karena dalam proses pengajuan KPR subsidi saya diinformasikan seperti itu, mohon tanggapannya, terimakasih.

Jawaban

Waaalaikumsalam, terima kasih telah menyampaikan pertanyaan kepada kami, terkait hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa saat ini di BP Tapera terdapat dua program KPR, jika ibu memanfaatkan KPR Tapera maka ibu tidak mendapatkan SBUM, sedangkan jika ibu memanfaatkan KPR Sejahtera FLPP maka ibu dapat mengajukan SBUM dikarenakan masing masing program memiliki nilai manfaat yang berbeda beda yang ditawarkan kepada penerima manfaat, demikian, terima kasih.





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Website
pembiayaan.pu.go.id

Twitter
[@pupr_Pembiayaan](https://twitter.com/pupr_Pembiayaan)

Instagram
[@pupr_Pembiayaan](https://www.instagram.com/pupr_Pembiayaan)

YouTube
[pupr_pembiayaan](https://www.youtube.com/pupr_pembiayaan)